



RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON TAHUN 2025

DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
Jl. raya bojonegara km 2 kedaleman cibeer cilegon

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2024

NOMOR : 31

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 26);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana ...

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan berserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKPD Tahun 2025.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Sosial;
 - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Renja Dinas Tenaga Kerja;
 - k. Renja Dinas Perhubungan;

l. Renja ...

- l. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - p. Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - q. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - r. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - s. Renja Inspektorat;
 - t. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - u. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - v. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
 - w. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - x. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - y. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - z. Renja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
 - aa. Renja Sekretariat Daerah;
 - bb. Renja Sekretariat DPRD;
 - cc. Renja Kecamatan Jombang;
 - dd. Renja Kecamatan Purwakarta;
 - ee. Renja Kecamatan Cilegon;
 - ff. Renja Kecamatan Citangkil;
 - gg. Renja Kecamatan Grogol;
 - hh. Renja Kecamatan Cibeber;
 - ii. Renja Kecamatan Ciwandan; dan
 - jj. Renja Kecamatan Pulomerak.
- (5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Juli 2024

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 31

KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dasar pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam rangka menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon melalui prinsip-prinsip kinerja.

Di dalam Rencana Kerja Tahun 2025, tujuan dan sasaran ditetapkan berdasarkan kepada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon akan melaksanakan 4 (empat) Program yang terdiri dari 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang ketenagakerjaan serta menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam satu tahun berjalan.


Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon

Drs. H. Panca N Widodo, M.Si
NIP. 196909071989031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 24

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD PERUBAHAN..... 24

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat..... 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..... 35

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 35

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 35

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 36

3.4 Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....38

3.5 Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah.....40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024 42

4.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 42

4.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Penggunaan TKA 55

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 6

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan (Retribusi IMTA)..... 22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Sasaran Dinas Tahun 2023..... 23

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... 25

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat..... 31

Tabel 2.6 Usulan Reses DPRD..... 34

Tabel 3.1 Sinergitas Program Pembangunan..... 35

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 36

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025.....37

Tabel 3.4 Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....38

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah.....40

Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 41

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.....55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun mendatang, yang telah tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 dirumuskan untuk menunjang Visi, Misi Kepala Daerah Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Ketenagakerjaan. Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan Program Prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2025, agar sejalan dengan target pembangunan yang harus dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 ini disusun dengan tata urutan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang rencana kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan rencana Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja Pelayanan, isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan Target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan Evaluasi Kinerja Tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran telah dilaksanakan, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat Kendala dan Permasalahan yang menjadi hambatan. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah melakukan Evaluasi terhadap Empat (4) Program dan Sebelas (11) Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, di antaranya :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
KEGIATAN	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
KEGIATAN	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
KEGIATAN	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi Kinerja dan Anggaran yang telah dicapai dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja
Tahun Anggaran 2023

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24,722,264,063	20,914,429,131	84.60			
2.07	Tenaga Kerja			24,722,264,063	20,914,429,131	84.60			
2.07.0.00.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA			24,722,264,063	20,914,429,131	84.60			
2.07.0.00.0.00.01.00	DINAS TENAGA KERJA			24,722,264,063	20,914,429,131	84.60			
2.07.01-4	Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH			10,261,075,703	9,305,470,668	90.69			
2.07.01-1		Nilai Lakip Perangkat Daerah		70.75 Poin	80.1 Poin	113.22	Nilai LAKIP pada Tahun 2023 mengalami peningkatan masuk ke kategori memuaskan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen seluruh pegawai pada Perangkat Daerah untuk melakukan upaya perbaikan, mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja secara Internal.		

2.07.01-2		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	69.0 Poin	76.47 Poin	110.83			
2.07.01-3		Indeks RB Perangkat Daerah	57.8 Poin	70.35 Poin	121.71	Nilai Indeks RB pada Tahun 2023 mengalami peningkatan secara signifikan, masuk ke kategori BB. Hal tersebut sejalan dengan komitmen seluruh pegawai pada Perangkat Daerah untuk melakukan upaya perbaikan, mulai dari Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, Kemitraan dan Sumber Daya serta Proses.		
2.07.01-1		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	5.0 Persen (%)	68.96 Persen (%)	1,379.20	Realisasi Retribusi Tahun 2023 mencapai target yg cukup besar dengan realisasi 68,96% dari target Tahun 2023 sebesar 5%. Indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi = $\frac{\text{Realisasi Retribusi Tahun 2023} - \text{Realisasi Retribusi sebelumnya}}{\text{Realisasi Retribusi Tahun sebelumnya}}$ $\times 100\%$ $= \frac{Rp.9.899.451.400 - Rp. 5.858.816.200}{Rp. 5.858.816.200} \times 100\% = 68,96\%$ Tingginya capaian tersebut merupakan hasil dari Program / Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon melalui aktivitas monitoring ke		

						lapangan dan melakukan pemanggilan kepada perusahaan pengguna TKA, memastikan lokasi kerja TKA tersebut sesuai dengan jabatan yang ada dalam izin atau notifikasinya. Faktor lainnya yang mempengaruhi tingginya realisasi serta dipengaruhi dengan adanya Project PT. Lotte Chemical Indonesia dan Project Jawa 9 dan 10, karena kedua project tersebut banyak menyerap Tenaga Kerja Asing (TKA).		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13,952,454	13,547,100	97.09			
2.07.01.2.01.01-1		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13,818,537	12,516,600	90.58			
2.07.01.2.01.06-1		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.00			
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			

2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6,851,353,845	6,161,588,241	89.93			
2.07.01.2.02.01-1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100.00			
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		105,360,000	96,930,000	92.00			
2.07.01.2.02.03-1		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00			
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4,001,096	3,997,800	99.92			
2.07.01.2.02.05-1		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.00			
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4,635,792	3,393,400	73.20	Untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran, penyediaan makan minum difasilitasi dari sub bag umum dan kepegawaian.		
2.07.01.2.02.07-1		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100.00			
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			

2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		41,619,701	41,347,400	99.35			
2.07.01.2.06.01-1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00			
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		158,965,509	154,159,786	96.98			
2.07.01.2.06.02-1		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00			
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		22,725,475	22,104,804	97.27			
2.07.01.2.06.03-1		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00			
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		48,939,655	44,242,408	90.40			
2.07.01.2.06.04-1		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00			
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		45,455,890	44,427,832	97.74			
2.07.01.2.06.05-1		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00			
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		13,635,000	13,200,000	96.81			
2.07.01.2.06.06-1		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00			

2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250,696,400	202,524,705	80.78	Pada APBD Perubahan Tahun 2023 terdapat penambahan Anggaran Perjalan Dinas Luar Daerah yang diperuntukan bagi Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial sebanyak lima (5) agenda perjalanan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 156.066.000,00. Dalam pelaksanaanya, agenda perjalanan dinas hanya dilaksanakan sebanyak tiga (3) agenda. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya waktu pelaksanaan serta padatnya agenda kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial (bertepatan dengan Agenda Penyusunan Upah Minimum Sektoral Tingkat Kota Cilegon Tahun 2024.		
2.07.01.2.06.09-1		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00			
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.00%	100.00			
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		219,586,784	216,005,000	98.37			
2.07.01.2.07.05-1		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	100.00			
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		37,740,000	36,750,000	97.38			

	Lainnya							
2.07.01.2.07.10-1		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.00			
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%	100.00			
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		406,986,408	386,026,727	94.85			
2.07.01.2.08.02-1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00			
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,476,745,523	1,431,380,092	96.93			
2.07.01.2.08.04-1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.00			
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%	100.00			

2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		173,311,500	63,696,000	36.75	Jumlah Unit Kendaraan Jabatan berubah menjadi 3 unit, dikarenakan 1 unit kendaraan turun menjadi kendaraan operasional, akan tetapi hal tersebut tidak disertai dengan pergeseran anggaran pemeliharaanya. Di samping itu pula, kondisi 2 unit kendaraan jabatan yang relatif masih baru, sehingga serapan anggaran didasarkan pada kebutuhan pemeliharaan kendaraan tersebut.		
2.07.01.2.09.01-1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100.00			
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		181,647,100	171,669,100	94.51			
2.07.01.2.09.02-1		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	100.00			
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		89,493,884	86,689,000	96.87			
2.07.01.2.09.06-1		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100.00			
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,405,150	99,274,673	98.87			

2.07.01.2.09.09-1		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.00				
NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2.07.03-1	Peningkatan dukungan sarpras, kurikulum pelatihan, sertifikasi pelatihan serta pemagangan								
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			11,009,541,006	10,196,326,116	92.61	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan di UPTD Latihan Kerja sebanyak 714 Orang (345 orang mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP & Kemnaker). Jumlah yang mengikuti seleksi pelatihan 2.732 orang. Capaian Indikator Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebesar 26,13% dari target 50%. Capaian ini juga terkait dengan rumusan indikator DO dimana kinerja berdasarkan pagu anggaran sementara pembagi berdasarkan minat masyarakat dan di Tahun 2023 . Program Pelatihan Kejuruan Las yang merupakan program favorit tidak dapat dilaksanakan mengingat workshop las sedang dalam proses rehabilitasi.	menyesuaikan perubahan DO dengan rumusan pembilang menggunakan peserta yang dilatih dan penyebut menggunakan target peserta berdasarkan pagu anggaran Tahun berjalan, mengingat penilaian kinerja berdasarkan pagu anggaran.	
2.07.03-1		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		50.0 %	26.13 %	52.26			
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100%	100.00%	100.00			

2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		4,541,728,954	3,862,784,376	85.05			
2.07.03.2.01.01-1		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	714 Orang	714 Orang	100.00			
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		6,467,812,052	6,333,541,740	97.92			
2.07.03.2.01.03-1		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	1 Unit	100.00			
2.07.04-3	Peningkatan kualitas layanan informasi ketenagakerjaan							
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		3,056,052,962	1,075,362,347	35.19	Realisasai Kinerja pada Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2023 cukup tinggi, dikarenakan Perangkat Daerah berperan secara aktif dalam melakukan Sosialisasi Mekanisme Penempatan, dan Monitoring Lowongan Pekerjaan ke Perusahaan serta terselenggaranya Program Pemagangan. Selain itu, dengan adanya Project Lotte Chemical Indonesia dan Project Jawa 9 dan 10 yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yg cukup banyak, sehingga membuat penyerapan tenaga kerja naik cukup signifikan. Dari Target Jumlah Pencari Kerja yg terdaftar sebanyak 6.434 orang, Sedangkan yang ditempatkan mencapai 4.135 orang.		

						Tingkat Penempatan Tenaga Kerja = Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dalam negeri 3.812 Orang, yang dimagangkan 264 orang dan penempatan pekerja migran 59 orang dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar 6.434 Org Anggaran Uang Saku Kegiatan Pemagangan tidak terserap karena adanya penyesuaian Kode Rekening Belanja Kegiatan yang baru bisa disesuaikan pada saat APBD-P Tahun 2023 yang menyebabkan serapan anggaran hanya bisa dilakukan selama 3 bulan, yaitu Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023.		
2.07.04-1		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30.0 % Per Tahun	64.26 % Per Tahun	214.20			
2.07.04-2		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30.0 %	64.26 %	214.20			
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	145.30%	145.30			

2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja		2,753,483,589	857,677,560	31.15	Secara Kinerja : Sub Keg Pelayanan antar Kerja dapat terlaksana. dengan target 2.000 org melampaui target capain, capain Tahun 2023 sebanyak 3.812 org yang ditempatkan, dan 264 orang yang dimagangkan. Adapun serapan anggaran 31,15 % Pada Tahun 2023 , dan Adanya penyesuaian Kode Rekening Belanja Kegiatan yang baru bisa disesuaikan pada saat APBD-P Tahun 2023 yang menyebabkan serapan anggaran hanya bisa dilakukan selama 3 bulan, yaitu Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023.		
2.07.04.2.01.02-1		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2,000 Orang	3,812 Orang	190.60			
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		97,161,205	90,383,165	93.02			
2.07.04.2.01.03-1		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	300 Orang	100.00			
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	145.67%	145.67			

2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		94,240,000	17,213,860	18.27	Sub Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja online memiliki target : Jumlah Pemberi kerja yang terdaftar di karir hub sebanyak 150 perusahaan dengan realisasi kinerja 292 perusahaan , dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar di karirhub dengan target 8.000 orang sedangkan realisasi nya 5.121 orang. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya peralihan sistem dari sistem manual ke sistem online (karirhub). Untuk serapan anggaran di Tahun 2023 hanya sebesar 18,27%, hal ini dikarenakan adanya kendala pada saat penentuan penyedia serta waktu proses penyerapan dan adanya keterlambatan pengajuan pengadaan barang di barjas.		
2.07.04.2.03.02-1		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 Perusahaan	292 Perusahaan	194.67			
2.07.04.2.03.02-2		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8,000 Orang	5,121 Orang	64.01			

2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja		30,546,100	30,046,904	98.37	Tingginya realisasi kinerja dikarenakan Adanya optimalisasi dari peran Perangkat Daerah dalam memberikan pembinaan kepada perusahaan agar pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Hal tersebut bertujuan agar semua proses perekrutan dapat dimonitoring dan dapat terjalin komunikasi yang baik antara opd dan perusahaan.		
2.07.04.2.03.03-1		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	81 Orang	162.00			
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.00%	100.00			
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		80,622,068	80,040,858	99.28			
2.07.04.2.05.01-1		Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Insentif Retribusi IMTA	36 Orang	36 Orang	100.00			
2.07.05-2	Peningkatan kualitas hubungan industrial							
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		395,594,392	337,270,000	85.26			

2.07.05-1		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	80.0 %	76.0 %	95.00			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	108.33%	108.33			
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		328,774,232	308,175,000	93.73		-	
2.07.05.2.02.01-1		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	20 Perkara	100.00			

2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		33,410,080	0	0.00	Secara Kinerja. Sub Kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dapat terlaksana dan melebihi target yang ditetapkan. Sepanjang Tahun 2023 jumlah kasus masuk / tercatat di Bidang Hubungan Industrial sebanyak 25 kasus, di mana semua kasus tersebut dapat terselesaikan baik itu melalui Perjanjian Bersama (PB), maupun Anjuran. Kondusifnya penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan tidak menimbulkan demo sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi. anggaran serapannya 0%. hal ini dikarenakan anggaran pada Sub Kegiatan ini dialokasikan untuk makanan dan minuman pengamanan Demo yang kemungkinan terjadi pada saat pelaksanaan Mediasi. akan tetapi pada pelaksanaannya di Tahun 2023 tidak terdapat unjuk rasa / demo saat pelaksanaan mediasi perselisihan / kasus hubungan industrial, sehingga anggaran tidak terserap.	mengajukan kode rekening baru terkait makanan dan minuman pelaksanaan mediasi dan anggaran yang ada dialihkan ke kode rekening tersebut	
2.07.05.2.02.02-1		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	25 Perkara	125.00			
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		33,410,080	29,095,000	87.08			
2.07.05.2.02.04-1		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00			

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal berikut ini :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, untuk Realisasi Kinerja Program pada Tahun 2023 diperoleh Nilai Lakip sebesar 80,10 Poin dengan Capaian Kinerja 113%. Untuk indikator Indeks RB diperoleh nilai sebesar 70,35 Poin dengan Capaian 122%. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai sebesar 76,47% dengan Capaian Kinerja 111%. Sedangkan untuk indikator Pertumbuhan Realisasi Retribusi pada Tahun 2023 relisasi kinerja nya cukup tinggi sebesar 68,96% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.
2. Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Realisasi Kinerja mencapai 26,13% dari target yang ditetapkan 50%, sehingga capaiannya sebesar 52,26%. Realisasi tersebut diperoleh dari perbandingan pencari kerja (peserta pelatihan) yang diberikan pelatihan barbasis kompetensi sebanyak 714 orang pada Tahun 2023 terhadap jumlah pendaftar pelatihan yang mengikuti seleksi sebanyak 2.732 orang.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki Indikator Persentase Penempatan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 memiliki target 30%, di mana realisasinya sebesar 64,36% dengan capaian kinerja 214%, Realisasi Kinerja program tersebut diperoleh dari Data Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri serta Penempatan Pemagangan yang berjumlah 4.135 orang terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6.424 orang.
4. Program Hubungan Industrial memiliki Indikator Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama. Pada Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 80%, di mana Realisasi Kinerjanya sebesar 76% sehingga capaiannya 95%. Nilai tersebut diperoleh dari Data Perselisihan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sebanyak 25 kasus dan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama yakni 19 kasus, serta ada 6 kasus yang belum selesai, baik yang berstatus masih anjuran ataupun *on proses*.

Dari Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 tersebut di atas menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan Program / Kegiatan pada Tahun 2025 agar pencapaian kinerja maupun serapan anggaran dapat terealisasi secara maksimal.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2020	6.000.000.000	7.750.089.476	129 %
2021	4.000.000.000	5.858.816.200	146,5 %
2022	-	-	-
2023	6.500.000.000	9.899.451.400	152%

Dari Tabel tersebut, dapat diketahui Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Tahun 2023 ditargetkan Rp. 6.500.000.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 9.899.451.400,- dengan persentase 152%. Hal tersebut bisa dicapai dikarenakan pada tahun tersebut terdapat project besar yang dimiliki oleh PT. LOTTE CHEMICAL serta Project Pembangunan Jawa 9 dan 10, yang di dalamnya banyak menyerap pemberdayaan tenaga kerja asing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Ketenagakerjaan, meskipun sebagai organisasi pelaksana Urusan Non Pelayanan Dasar. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi Misi Kepala Daerah Periode 2021 – 2026.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKTOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	70,75	80,10	113%
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	57,80	70,35	122%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	69	76,47	111%
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	%	5	68,96	1.379
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	%	30	64,36	214%

Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) indikator yang terbagi dalam dua Sasaran Strategis, di mana Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Dan Profesionalisme Aparatur memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria penilaian kinerja tinggi. Sedangkan Sasaran Strategis Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat pada Tahun 2023 berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 30% dengan realiasinya sebesar 64,36%, sehingga Capaian Kinerjanya sebesar 214% dengan rincian Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar sebanyak 6.424 orang dan yang ditempatkan serta dimagangkan sebanyak 4.135 orang. Tingginya Realisasi Kinerja dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon aktif melakukan Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Monitoring

Lowongan Kerja ke Perusahaan, serta Program Pemagangan. Selain itu, dengan adanya Project Lotte Chemical Indonesia dan Project Jawa 9 dan 10 yang membuat Penyerapan Tenaga Kerja meningkat cukup signifikan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penduduk dan Tenaga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan proses pembangunan di samping sumber daya lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan, sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak.

Dari target kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon perlu meningkatkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon antara lain :

- a. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dengan membuat program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Cilegon ;
- b. Mengadakan sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja;
- c. Memonitoring lowongan dan penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon;
- d. Melakukan pembinaan dan monitoring penggunaan TKA;
- e. Mengadakan job fair mini / fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- f. Meningkatkan kembali program pemagangan lulusan pelatihan ke perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan program kerja Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari Rancangan RKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025, sebagian besar telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan serta proses penyusunan rancangan awal telah mengikuti mekanisme partisipatif. Review terhadap rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIANKINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA				22.048750.775					19.049.463.626	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Pertumbuhan Realisasi Retribusi Indeks Kepuasan Masyarakat	72,75 (Poin) 62 (Poin) 5% 72 (Poin)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Pertumbuhan Realisasi Retribusi Indeks Kepuasan Masyarakat	72,75 (Poin) 62 (Poin) 5% 72 (Poin)		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Laporan / Dokumen)	3 Laporan / Dokumen	82.911.634,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Laporan / Dokumen)	3 Laporan / Dokumen	82.911.634,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	55.807.924,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dokumen	55.807.924,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2 Laporan	27.103.710,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3 Laporan	27.103.710,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	5 Laporan/ Dokumen	7.269.363.636,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	5 Laporan/ Dokumen	7.269.363.636,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/bulan)	30 Org Bulan	7.160.949.561,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN (Orang/bulan)	30 Org Bulan	7.160.949.561,00	

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon

Tahun 2025

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	96.440.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	105.360.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5 Laporan	4.852.185,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.852.185,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Laporan)	6 Laporan	5.621.890,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	5.621.890,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Dokumen)	1 Dokumen	1.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Dokumen)	1 Dokumen	1.500.000,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PerangkatDaerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PerangkatDaerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan (Laporan / Dokumen)	4 Paket	5.000.000,00	Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan (Laporan / Dokumen)	-	0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan (Paket)	4 Paket	5.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan (Paket)	-	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	7 Laporan/ Dokumen	778.250.235,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	7 Laporan/ Dokumen	778.250.235,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	42.478.871,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan (Paket)	1 Paket	42.478.871,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	40.771.364,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	1 Paket	40.771.364,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)	1 Paket	410.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)	1 Paket	410.000.000,00	

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12 Laporan	220.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12 Laporan	220.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	18 Unit	824.445.333,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	38 Unit	168.522.285,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	4 Unit	150.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	0	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	10 Unit	72.522.285,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	20 Unit	50.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7 Unit	505.923.048,00	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	96.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	96.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan / Dokumen)	3 Laporan / Dokumen	2.746.047.288,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan / Dokumen)	3 Laporan / Dokumen	2.352.210.676,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	630.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	630.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	559.910.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	145.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.556.137.288,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.459.234.662,00	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dihasilkan(Unit)	124 Unit	837.732.649,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dihasilkan(Unit)	87 Unit	525.050.673,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4 Unit	121.624.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4 Unit	121.624.300,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16 Unit	217.462.700,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	217.462.700,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100 Unit	90.714.220,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100 Unit	86.689.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	407.931.429,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	99.274.673,00	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan BerbasisKompetensi (%)	50%	6.500.000.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	50%	4.082.214.553,00	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan(%)	70%				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapatkan pembinaan(%)	70%		
		Persentase Perusahaan Kecil / UKM yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	25%				Persentase Perusahaan Kecil / UKM yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	25%		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengadaan SaranaPelatihan Kerja (Laporan / Dokumen)	2 Laporan/ Dokumen	6.500.000.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Pengadaan SaranaPelatihan Kerja (Laporan / Dokumen)	2 Laporan/ Dokumen	4.082.214.553,00	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	1014 Orang	6.500.000.000,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	1008 Orang	4.082.214.553,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	1 Unit	-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	1 Unit	0	

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30%	2.500.000.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Penempatan Tenaga Kerja	30%	2.345.677.560,00	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di DaerahKabupaten / Kota (Laporan / Dokumen)	100%	1.570.000.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di DaerahKabupaten / Kota (Laporan / Dokumen)	100%	1.415.677.560,00	
Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKADdan AKL (Orang)	2000 orang	1.012.000.000,00	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	2000 orang	857.677.560,00	
Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1000 orang	318.000.000,00	Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	1000 orang	318.000.000,00	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD(Orang)	40 Orang	240.000.000,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD(Orang)	40 Orang	240.000.000,00	
Pengelolaan Informasi pasar kerja		Jumlah Laporan Pengelolaan InformasiPasar Kerja (Laporan / Dokumen)	2 Dokumen/ Laporan	568.000.000,00	Pengelolaan Informasi pasar kerja		Jumlah Laporan Pengelolaan InformasiPasar Kerja (Laporan / Dokumen)	2 Dokumen/ Laporan	568.000.000,00	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5000 orang	260.000.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	5000 orang	260.000.000,00	
Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui JobFair/Bursa Kerja (Orang)	30 orang	308.000.000,00	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui JobFair/Bursa Kerja (Orang)	24 orang	308.000.000,00	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota (Laporan / Dokumen)	2 Dokumen/ Laporan	362.000.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan PelindunganPMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota (Laporan / Dokumen)	2 Dokumen/ Laporan	362.000.000,00	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MigranIndonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkan Kompetensinya (Orang)	100 Orang `	257.000.000,00	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja MigranIndonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	100 Orang `	257.000.000,00	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan(Orang)	40 Orang `	105.000.000,00	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan(Orang)	40 Orang `	105.000.000,00	

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan denganperjanjian bersama (%)	80%	495.000.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan denganperjanjian bersama (%)	80%	1.435.262.374,00	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus)	20 Kasus	495.000.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus)	20 Kasus	1.435.262.374,00	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus)	20 Perkara	395.872.100,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	395.872.100,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yangTerselesaikan (Perkara)	20 Perkara	36.699.900,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	20 Perkara	36.699.900,00	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 Lembaga	59.428.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1 Lembaga	59.428.000,00	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.650 Orang	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4.650 Orang	940.262.374,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses Penyusunan Perencanaan Tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada Tahun 2024, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi dari masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah terdapat beberapa Usulan Program/Kegiatan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Setelah itu, dilakukan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan tersebut yang kemudian secara langsung bisa menjadi Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025. Penentuan Usulan Program dan Kegiatan yang diterima berdasarkan Skala Prioritas yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5
Usulan Masyarakat

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pengusul	Indikator / Usulan	Besaran / Volume
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
1		Link. Curug Kepuh RT 005 RW 002 Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon	Pelatihan AC, Montir, Las	-
2		RW 001, RW 002, RW 003, RW 004. Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Forklift	Rp. 40.000.000 5 Orang
3		RW 001, RW 002, RW 003, RW 004. Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Desain Grafis	Rp. 15.000.000 5 Orang
4		RW 001, RW 002, RW 003, RW 004. Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Driver	Rp. 30.000.000 5 Orang
5		RW 001, RW 002, RW 003, RW 004. Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Security	Rp. 60.000.000 12 Orang
6		RW 001, RW 002, RW 003, RW 004. Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Public Speaking	Rp. 20.000.000 10 Orang
7		Karang Taruna Kelurahan Warnasari, Citangkil	Pelatihan Security	-
8		Link. Telu Rw 04, Keluarah Jombang Wetan Kecamatan Jombang	Pelatihan Las	14 Orang
9		Kelurahan Ketileng	Pelatihan Operator Alat Berat	-
10		Kelurahan Ketileng	Pelatihan Security	-
11		Kelurahan Ketileng	Pelatihan Elektronik	-
12		Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan	Pelatihan K3 Umum	Rp. 40.000.000 5 Orang
13		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010	Pelatihan Las	10 Orang

		Kecamatan Jombang		
14		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Security	20 Orang
15		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Menjahit	10 Orang
16		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Stir Mobil / Driver	10 Orang
17		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Rias Pengantin	10 Orang
18		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Pangkas Rambut	10 Orang
19		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan AC	10 Orang
20		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Boga	10 Orang
21		Kelurahan Masigit RW 001- RW 010 Kecamatan Jombang	Pelatihan Komputer	10 Orang
22		Link Tunjung Putih RW.02 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang	Pelatihan Secutiry	10 Orang
23		Link Pecek RW.03, Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang	Pelatihan Menjahit	20 Orang
24		Link Kedung RW.04, Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Rias	20 Orang
25		Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Rias	10 Orang
26		Linkungan RW 001 RW 002 RW 003 RW 004 RW 005 RW 006 RW 007 Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Operator Forklift	Rp. 40.000.000 5 Orang
27		Kelurahan Lebakgede RT 004/009 Kecamatan Pulo Merak	Pendidikan dan Pelatihan Kerja	-
28		Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon	Pelatihan Stir Mobil / Driver	-
29		Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon	Pelatihan Las	
30		Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	Pelatihan Forklif	Rp. 80.000.000 10 Orang
31		JL. KECUBUNG RAYA 02 BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon	Pelatihan Menjahit	-
32		JL. KECUBUNG RAYA 02 BBS II Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon	Pelatihan Public Speaking	-
33		Link. BBS II RT. 007 RW. 004 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon	Pelatihan Janaiz	-
34		Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	Pelatihan Public Speaking	Rp. 20.000.000 10 Orang
35		Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta	Pelatihan Content Creator	Rp. 20.000.000 10 Orang
36		Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Forklift	Rp. 40.000.000 5 Orang
37		Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Tata Rias Pengantin	Rp. 40.000.000 20 Orang
38		Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber	Pelatihan Kerja	-
39		Seluruh RW se- Kalitimbang Kecamatan Cibeber	Pelatihan Kerja	-
40		risma kelurahan suralaya, Kecamatan Pulomerak	Peningkatan SDM	-
41		kader posyandu kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak	Pelatihan Komputer	

42		Link. Karang Tumaritis RT 016 RW 003 Lebak Denok Citangkil	Pelatihan Keterampilan Kerja	-
43		Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta	Pelatihan Ketarampilan Kerja	-
44		Link Taman Raya RW.05 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Rias	-
45		Link Metro Villa RW.06 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang	Pelatihan Bengkel	-
46		Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Kerja	-
47		Link. Acing RT. 01 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Kerja	-
48		Link. Acing RT. 02 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Komputer	10 Orang
49		Link. Acing RT. 02 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan AC	10 Orang
50		Link. Acing RT. 02 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Las	10 Orang
51		Link. Acing RT. 02 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Menjahit	10 Orang
52		Link. Acing RT. 02 RW. 05 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelatihan Tata Boga	5 Orang
53		Link. Sukadamai RT. 03 RW. 07 Kelurahan panggung rawi Kecamatan Jombang	Pelathan Tata Boga	5 Orang
54		Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulo Merak	Pelatihan Las,Pertukangan,automotif pemuda tamansari	-
55		Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber	Pemenuhan skil kualitas tenaga kerja	-
56		Link. Masigit RT 002 / RW 008 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol	Pelatihan Komputer	
57		Link. Masigit RT 002 / RW 008 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol	Kurang memadainya SDM kelurahan di bidang vidio atau digital marketing	-
58		Link. Masigit RT 002 / RW 008 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol	Pelatihan AC Mobil	-
59		Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Security	Rp. 36.000.000 12 Orang
60		Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan	Pelatihan K3 Umu	Rp. 96.000.000 12 Orang
61		Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan	Pelatihan Public Speaking	Rp. 20.000.000 10 Orang
62		Kelurahan Geram Kecamatan Grogol	Pelatihan Peningkatan Skill	-
63		Link Pakuncen Rw 003 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon	Pelatihan Security	-
64		Link. Tegal Tong RW 005 Kebonsari Kecamatan Citangkil	Pelatlihan Kerja	-
65		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan Operator Forklift	-
66		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan K3 Umum	-
67		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan Komputer	-
68		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan Security	-
69		Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil	Pelatihan K3 Umum	-

70		Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil	Pelathan Scaffolding	-
71		Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil	Pelatihan Sertifikasi Ketinggian	-
72		Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil	Pelatihan Operator Forklift	-
73		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan Operator Forklift	-
74		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan K3 Umum	-
75		Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil	Pelatihan Komputer	-
76		Posyantek Kelurahan Samangray	Perlunya Sosialisasi Peningkatan Pendidikan SLTP/A	-
77		Link. Karang Tumaritis RT 016 RW 003 Lebak Denok Citangkil	Penanganan Pengangguran (Live Skill) untuk Meningkatkan Pengetahuan/Keterampilan, Sesuai Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri	-
	Program Penempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	Pelayanan Antar Kerja			
78	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang	Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan Syarat Kerja	10 Orang

Selain mengakomodir beberapa Usulan Kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan pula usulan beberapa kegiatan dari masyarakat melalui Pokir (Pokok Pikiran) Dewan yang secara keseluruhan berjumlah 1 usulan. Usulan yang berasal dari wakil masyarakat (Anggota DPRD) yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang memiliki dasar prioritas. Berikut ini usulan pokir dan tindak lanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 2.6
Usulan Reses DPRD

No	Sumber Usulan (Fraksi)	Permasalahan	Usulan / Volume	Lokasi	Program / Kegiatan	Keterangan
1	Isro Miraj, S.E (Fraksi Golkar)	Fasilitasi Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Lokal oleh Disnaker agar terserap di Pabrik-Pabrik Industri yang ada di kota cilegon	50 Orang	Wilayah Kel. Citangkil, Kota Cilegon	Program Penempatan Tenaga kerja	•

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam upaya mencapai keberhasilan Pembangunan di Kota Cilegon, maka diperlukan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Sinergi tersebut dilakukan melalui penyesuaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cilegon, dengan Strategi Pencapaian Agenda Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Banten. Di mana Prioritas Pembangunan Kota Cilegon seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026, salah satunya adalah Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata, dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat melalui Program Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, yang merupakan upaya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pelaksanaan Program tersebut difokuskan pada Aspek Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Layanan Ketenagakerjaan.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon adalah :

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pembangunan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Layanan Pemerintahan
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan telaah Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan Strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Layanan Pemerintahan”** dan **“Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur;
- 2. Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat.

Adapun target dari Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	62,97 (B)	71,2 (BB)	75,3 (BB)	78 (BB)	82,2 (A)	84,2 (A)
			Nilai Lakip Perangkat Daerah	69,02 (Poin)	70,02 (Poin)	70,75 (Poin)	71,75 (Poin)	72,75 (Poin)	73 (Poin)
			Indeks RB Perangkat Daerah	53,80 (Poin)	55,80 (Poin)	57,8 (Poin)	60 (Poin)	62 (Poin)	64 (Poin)
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	100%	100%	5%	5%	5%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	65 (Poin)	67 (Poin)	69 (Poin)	70 (Poin)	72 (Poin)	74 (Poin)
2	Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,9%	11,16%	10,46%	9,81%	9,19%	8,62%
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Sumber : Dokumen Revisi Renstra-PD 2021-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan dan penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 mengacu pada Visi dan Misi Walikota Cilegon serta Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026. Pada Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon terdiri dari 4 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan sesuai dengan Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Progam Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
	3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelayanan Antar Kerja 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja 3. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
	2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 2. Job Fair / Bursa Kerja

	3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab / Kota	1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
4. Program Hubungan Industrial	1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab / Kota	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab / Kota 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab / Kota 3. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab / Kota 4. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

3.4. Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pada Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon memiliki beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Progam Kegiatan yang Berperan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	ANGGARAN RENJA 2025	TAGGING
Program : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi • Pendidikan P3TIK (AMC) • Pelatihan Public Speaking • Pelatihan Komputer • Pelatihan CAD • Pelatihan Las SMAW / FCAW / GTAW • Pelatihan Bubut • Pelatihan Otomotif Motor / Mobil • Pelatihan Menjahit • Pelatihan Teknisi AC • Pelatihan Tata Rias • Pelatihan Tata Boga • Pelatihan Forklift • Pelatihan Listrik (Bangunan Sederhana / Listrik Industri) • Pelatihan Security • Pelatihan K3 Umum	Rp. 4.082.214.553	Ketersediaan Pasokan ; Tambah Pendapatan

Program: Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab / Kota	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL • Pemagangan Dalam Negeri • Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja • Forum Komunikasi HRD	Rp. 857.677.560	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan • Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Rp. 318.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD • Pelayanan Disabilitas Konsolidasi Unit Pelayanan Disabilitas	Rp. 240.000.000	
Program: Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar Melalui Sistem Online (KarirHub) • Monitoring Lowongan Kerja • Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 260.000.000	
	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja • Pelaksanaan Bursa Kerja / Fasilitas Penempatan	Rp. 308.000.000	
Program: Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kab / Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya • Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia	Rp. 257.000.000	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan • Koordinasi dan Evaluasi Purna Pekerja Migran Indonesia	Rp. 105.000.000	
Program : Hubungan Industrial Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab / Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja • Jumlah Tenaga Kerja Informal yang Mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp. 940.262.374	
Total Anggaran Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem				Rp. 7.368.154.487

3.5. Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021 – 2026 merupakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai prioritas untuk mencapai Sasaran Pembangunan Tahun 2021- 2026. Adapun Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon merupakan salah satu upaya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yaitu:

Tabel 3.4
Progrom Kegiatan Prioritas DaerahTahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN /	SUB KEGIATAN	OUTPUT / SUB OUTPUT	ANGGARAN RENJA 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Prioritas 2 Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Penerapan SAKIP)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Renja yang Disusun - Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang Disusun - Jumlah Dokumen Manajemen Resiko yang Disusun - Jumlah Dokumen Renstra yang Disusun	Rp. 55.807.924
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota (Prioritas 1 Peningkatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan Prioritas 6 25% Kenaikan Tunjangan Kinerja Daerah ASN)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai (ASN) yang Memperoleh Tambahan Penghasilan	Rp. 2.851.598.582
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas 8 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (Kegiatan Prioritas 8.1 Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja Bersertifikasi)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi - Pendidikan P3TIK (AMC) - Pelatihan Public Speaking - Pelatihan Komputer - Pelatihan CAD - Pelatihan Las SMAW / FCAW / GTAW - Pelatihan Bubut - Pelatihan Otomotif Motor / Mobil - Pelatihan Menjahit - Pelatihan Teknisi AC - Pelatihan Tata Rias - Pelatihan Tata Boga - Pelatihan Forklift - Pelatihan Listrik (Bangunan Sederhana / Listrik Industri) - Pelatihan Security - Pelatihan K3 Umum	Rp. 4.082.214.553

Program Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas 8 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab / Kota (Kegiatan Prioritas 8.1 Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja Bersertifikasi)	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL • Pemagangan Dalam Negeri • Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja • Forum Komunikasi HRD	Rp. 857.677.560
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan • Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Rp. 318.000.000
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD • Pelayanan Disabilitas • Konsolidasi Unit Pelayanan Disabilitas	Rp. 240.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Kegiatan Prioritas 8.1 Pelatihan, Pemagangan dan Penempatan Tenaga Kerja Bersertifikasi)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar Melalui Sistem Online (KarirHub) • Monitoring Lowongan Kerja • Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 260.000.000
		Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja • Pelaksanaan Bursa Kerja • Fasilitas Penempatan	Rp. 308.000.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kab / Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya • Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia	Rp. 257.000.000
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan • Koordinasi dan Evaluasi Purna Pekerja Migran Indonesia	Rp. 105.000.000
	Total Anggaran Program/Kegiatan Prioritas			Rp. 9.335.298.619

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

4.1 Rencana Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta mendukung Program Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon pada Tahun 2025 mengusulkan 4 Program, yang terbagi ke dalam 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dari 4 Program tersebut, yang masuk dalam Program Prioritas Daerah adalah **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** serta **Program Penempatan Tenaga Kerja**.

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan akan dilaksanakan secara maksimal dengan mengoptimalkan peran Sumber Daya Aparatur, sarana prasarana yang ada, serta dukungan anggaran yang tersedia. Adapun Rencana Alokasi Anggaran untuk Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						19.049.463.626,00							14.979.119.346,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.049.463.626,00							14.979.119.346,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						17.086.075.791,00							0,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	-			72,75 Poin	11.186.309.139,00						72,75 Poin	11.186.309.139,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	-			3 Laporan / Dokumen	82.911.634,00			-	Meningkatk an Kualitas Layanan Pemerintahan	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	3 Laporan / Dokumen	82.911.634,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	55.807.924,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Layanan Pemerintaha n	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	3.00 Dokumen	55.807.924,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	27.103.710,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Layanan Pemerintaha n	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	2.00 Laporan	27.103.710,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			5.00 Laporan / Dokumen	7.269.363.636,00			-	Meningkatk an Kualitas Layanan Pemerintaha n	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	5.00 Laporan / Dokumen	7.269.363.636,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30.00 Orang/bulan	7.160.949.561,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Layanan Pemerintaha n	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	30.00 Orang/bu lan	7.160.949.561,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	96.440.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	12.00 Dokumen	96.440.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	4.852.185,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1.00 Laporan	4.852.185,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				6 Laporan	5.621.890,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	6 Laporan	5.621.890,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan / Dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			4 Laporan / Dokumen	0			-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	4 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			7 Laporan / Dokumen	778.250.235,00			-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	7 Laporan / Dokumen	409.250.235,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.478.871,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1.00 Paket	42.478.871,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.771.364,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	40.771.364,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	410.000.000,00	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	410.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Paket	25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	12.00 Dokumen	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	220.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	12 Laporan	220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			18 Unit	168.522.285,00			-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	41 Unit	674.445.333,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	4 Unit	150.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	72.522.285,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	10.00 Unit	72.522.285,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	0	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja		355.923.048,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	96.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Unit	96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Laporan / Dokumen	2.352.210.676,00			-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	3 Laporan / Dokumen	2.746.047.288,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	476.163.388,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	12.00 Laporan	630.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	319.910.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	1 Laporan	559.910.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	1.556.137.288,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	12.00 Laporan	1.556.137.288,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			176 Unit	525.050.673,00			-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	124 Unit	782.101.220,00	DINAS TENAGA KERJA

		Daerah														
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	121.624.300	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	4 Unit	121.524.300	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	217.462.700,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	16 Unit	217.462.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	86.689.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja		90.714.220,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	99.274.673,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Dinas Tenaga Kerja	4 Unit	352.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-			50 %	4.082.214.553,00						-	3.000.000.000,00	

	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Kompetensi Unit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dan Sarana Pelatihan Kerja	-			1 Laporan	4.082.214.553,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarkat Kota Cilegon	1 Laporan	3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				1.014 Orang	4.082.214.553,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI PER PANJANGAN IZIN MEMPEKE RJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	-	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				1 Unit	0	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cilegon		0,00	
3,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</i>	-			30 %	2.345.677.560,00						30 %	0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota</i>	-			3 Laporan / Dokumen	1.415.677.560,00				Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)	3 Laporan / Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														

			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2.000.00 Orang	857.677.560,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1.000 Orang	318.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				40.00 Orang	240.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-			2 Laporan / Dokumen	568.000.000,00			-	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				5.000 Orang	260.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				60 Orang	308.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Laporan / Dokumen	362.000.000,00			-	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja - Pekerja Migran & Calon Pekerja Migran)	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	257.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja - Pekerja Migran & Calon Pekerja Migran)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				40 Orang	105.000.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Masyarakat Kota Cilegon (Pencari Kerja - Pekerja Migran & Calon Pekerja Migran)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	-			80 %	1.435.262.374,00						80%	0,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial	-			20 Kasus	1.435.262.374,00			-	-	Perusahaan dan Pekerja (Buruh)	20 Kasus	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20 Perkara	395.872.100,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perusahaan dan Pekerja (Buruh)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara yang Terselamatkan				20 Perkara	39.699.900,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perusahaan dan Pekerja (Buruh)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	59.428.000,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perusahaan dan Pekerja (Buruh)		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				4.650 Orang	940.262.374,00	Kota Cilegon, Cibeber, Kedalem an	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan dan Pekerja (Buruh)		0,00	
	J U M L A H							19.049.463.626,00							14.979.119.346,00	

4.2 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon Tahun 2025 yang bersumber dari Retribusi Penggunaan Tenaga Asing (RPTKA) diproyeksi akan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada Jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan yang berada di Wilayah Kota Cilegon, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Proyeksi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2025

URAIAN		KETERANGAN
Retribusi / Masa Kerja / Bulan	100 USD	Rincian masa kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) : - TKA dengan masa kerja 12 Bulan : 663 Orang - TKA dengan masa kerja 11 Bulan : 2 Orang - TKA dengan masa kerja 10 Bulan : 12 Orang - TKA dengan masa kerja 9 Bulan : 15 Orang - TKA dengan masa kerja 8 Bulan : 18 Orang
Total Masa Kerja Tka	8.377 Bulan	
Total Retribusi Dalam Us Dollar	837.700 USD	
Asumsi Kurs Terhadap Us Dollar	Rp. 14.000	
Total Potensi Retribusi Dalam Rupiah	Rp. 11.727.900.000	
		Asal Negara Tenaga Kerja Asing (TKA) : - Korea Selatan : 526 orang - Jepang : 56 orang - India : 50 orang - RRC : 48 orang - Thailand : 10 orang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan menggunakan kurs dollar pada angka Rp 14.000,00, potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon yang akan diperoleh dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Tahun 2025 sebesar Rp 11.727.900.000,00 (***Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah***) dengan estimasi Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi tersebut sebanyak **710 orang** dengan perpanjangan ijin masa kerja yang variatif mulai dari **8 bulan – 12 bulan**. Data Tenaga Kerja Asing yang tercantum di atas diperoleh dari situs resmi Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia tka-daerah.kemenaker.go.id.

Peningkatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan diperoleh secara maksimal apabila terdapat peran aktif yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Pemerintah Kota Cilegon, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap konsistensi para perusahaan di Wilayah Kota Cilegon untuk membayarkan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di perusahaan tersebut masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cilegon.

BAB V

P E N U T U P

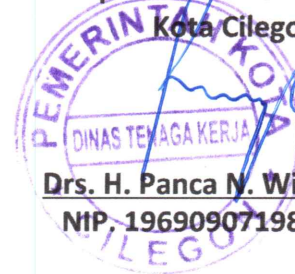
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Selain menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2025 yang mengarah pada Pencapaian Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di Wilayah Kota Cilegon. Di samping itu, Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 berfungsi sebagai sarana untuk melakukan peningkatan kinerja dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam kurun waktu satu (1) tahun, yang di dalamnya berisi gambaran indikator kinerja dan pagu indikatif yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja serta Program Hubungan Industrial.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 yang telah disusun ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan kegiatan yang berkualitas, sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan Masyarakat Kota Cilegon. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 telah mengakomodir berbagai saran dan masukan yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan Berbasis pada kepentingan Masyarakat Kota Cilegon melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Aparatur dan Sumber Pendanaan (Anggaran Kegiatan) serta komitmen dari seluruh Unsur Perangkat Daerah, dimulai dari Pimpinan, Pejabat yang membidangi serta unsur pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Keterlibatan semua komponen tersebut diharapkan dapat melaksanakan seluruh Rencana Kerja yang telah disusun dengan akuntabel, efektif, efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2025 ini disusun dan diharapkan mampu mengsinergikan secara berkelanjutan antara seluruh Agenda Program Pembangunan serta sebagai media Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Program Kegiatan agar sesuai dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Cilegon, 22 Juli 2024

**Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Cilegon,**



Drs. H. Panca N. Widodo.M.Si
NIP. 196909071989031006